



4

Oleh: Puji Rianto

Pembangunan ICT Yang Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan Menuju Masyarakat Informasi

Pendahuluan

Joseph Stiglitz, peraih nobel bidang ekonomi tahun 2001, mengemukakan bahwa dampak perdagangan bebas tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh negara di dunia, utamanya oleh masyarakat Negara Dunia Ketiga. Ini karena, menurut Stiglitz, ketiadaan akses informasi yang sama (*assimetric information*) (Stiglitz, 2007). Dalam kaitan ini, ada orang-orang atau kelompok orang yang mempunyai informasi (*the have*) dan orang-orang yang tidak mempunyai cukup informasi (*the have not*). Orang atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki cukup informasi, dan ini biasanya direpresentasikan oleh masyarakat Negara Dunia Ketiga, kurang mampu memanfaatkan dengan baik keuntungan yang timbul dari dibukanya pasar-pasar dunia. Sebaliknya, masyarakat di negara maju mampu memanfaatkan peluang tersebut karena mereka mempunyai akses informasi yang cukup baik. Oleh karena itu, selama akses informasi terus mengalami ketimpangan maka keuntungan perdagangan bebas tetap hanya akan dinikmati oleh negara-negara dimana masyarakatnya mempunyai kelimpahan informasi, utamanya informasi ekonomi (*economics information*).

Tentu saja, kesamaan akses informasi hanya menjadi salah satu faktor agar keuntungan-keuntungan perdagangan bebas dapat dinikmati oleh seluruh negara. Faktor-faktor lain seperti besaran

subsidi, hambatan-hambatan perdagangan yang sifatnya nontarif (*nontarif barrier*) menjadi faktor lain yang turut memberikan kontribusi mengapa Negara Dunia Ketiga tidak mampu mengambil keuntungan yang sama besarnya dibandingkan dengan negara maju (*Green and Luehrmann, 2003; Stiglitz, 2007*). Oleh karena itu, ahli ekonomi seperti Stiglitz menyarankan pentingnya sistem perdagangan yang adil, yakni suatu sistem perdagangan yang akan muncul ketika subsidi dan hambatan-hambatan perdagangan dihilangkan (*Stiglitz, 2007: 137*). Argumentasi Stiglitz didasarkan pada kenyataan bahwa para petani di negara-negara maju menikmati subsidi yang sangat besar. Selain itu, dalam rangka melindungi petani dalam negeri yang biasanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, pemerintah di negara-negara maju menggunakan berbagai mekanisme untuk menghambat masuknya produk-produk pertanian dari negara Dunia Ketiga. Sebagai contoh, ketika Meksiko mampu mengeksport tomat ke Amerika dengan harga yang jauh lebih murah, para petani Amerika menekan Kongres agar mendesak Meksiko untuk menaikkan harga tomatnya sama dengan harga tomat lokal Amerika (*Stiglitz, 2007: 137*). Akibatnya, petani Meksiko tidak bisa memanfaatkan keunggulan komparatif yang mereka miliki.

Meskipun akses informasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan bagi distribusi keuntungan perdagangan bebas sebagaimana dipaparkan di atas, tetapi poin penting gagasan Stiglitz adalah betapa krusialnya peranan informasi dalam mendorong perdagangan dunia yang lebih menguntungkan banyak pihak. Dalam kaitan inilah, sebenarnya, gagasan mengenai pembangunan ICT yang ditujukan untuk menopang ekonomi kerakyatan hendak ditempatkan. Argumentasi dasarnya adalah komunikasi dan informasi merupakan sesuatu yang krusial dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Akses informasi karenanya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses pembangunan, dan selanjutnya informasi dan teknologi komunikasi (ICT) merupakan sarana berbagi informasi yang tidak hanya menghubungkan manusia satu dengan yang lainnya (*a connection between people*), tetapi yang lebih penting merupakan suatu hubungan dalam jalinan proses pembangunan itu sendiri (*Hudson, 2006: 310*). Dalam konteks ini juga, ICT ditempatkan sebagai faktor sangat penting dalam rangka mengentaskan kemiskinan (lihat Visi WSIS). Visi inilah yang

kemudian diturunkan oleh pemerintah Indonesia dengan mengembangkan berbagai titik informasi seperti pengembangan *Community Acces Point* (CAP). Titik-titik inilah yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, termasuk di dalamnya mengembangkan ekonomi rakyat kecil.

Pandangan yang menempatkan ICT sebagai faktor penting dalam memberdayakan ekonomi rakyat tentu saja tidak keliru. Meskipun demikian, ICT seyogianya tidak dilihat sebagai variabel pengaruh (*variabel independent*) yang daripadanya sumber perubahan terjadi, termasuk kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat kecil. Sebaliknya, ICT akan jauh lebih tepat jika ditempatkan sebagai katalisator bagi banyak perubahan di bidang sosial-ekonomi dan juga politik sebagaimana dapat kita lihat peranannya dalam memacu globalisasi ekonomi. Dengan cara semacam ini, kita tidak akan terjebak pada gagasan yang menempatkan teknologi komunikasi sebagai satu-satunya variabel paling penting dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Namun, ia harus tetap ditempatkan dalam perspektif ekonomi-politik yang lebih luas seperti kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor pendidikan, pembangunan ekonomi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan juga tatanan ekonomi politik dominan saat ini, neoliberal. Dengan demikian, kita akan lebih mampu melihat pembangunan ICT yang memberdayakan ekonomi rakyat dalam kerangka perspektif dan kebijakan yang lebih luas dan tidak terjebak pada determinisme teknologi. Dengan kata lain, kebijakan pengembangan ICT untuk rakyat kecil tidak bisa dilihat dari sudut pandang atau perspektif tunggal, tetapi harus ditempatkan dalam kaitannya dengan perspektif-perspektif lain yang relevan.

Argumentasi inilah yang akan menjadi dasar atau pijakan tulisan ini. Peranan teknologi komunikasi dan informasi memang tidak bisa diabaikan dalam memberdayakan masyarakat, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga sosial-budaya dan politik. Namun, perspektif ekonomi politik dengan gamblang menjelaskan bahwa struktur dimana relasi-relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat mempunyai andil yang cukup besar dalam mempengaruhi besaran kontribusi ICT dalam proses pemberdayaan tersebut. Sebagaimana dikemukakan Moscow dan Reddick (1997), perspektif ekonomi politik menjadi semakin relevan dalam kebijakan publik karena teknologi komunikasi dan jasa menjadi

faktor kunci dalam kebijakan industri yang disponsori negara. Oleh karena itu, analisis atas struktur ekonomi politik tidak bisa ditinggalkan jika kita ingin mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai peranan ICT dalam menopang ekonomi kerakyatan. Selain itu, perspektif ini juga

akan memberikan kita identifikasi atas kendala-kendala yang akan muncul untuk kemudian merumuskan langkah kebijakan yang tepat dalam menghadapi struktur yang sebenarnya sangat tidak *compatible* bagi gagasan ekonomi kerakyatan itu sendiri.

Ekonomi-Politik Masyarakat Informasi

Dalam buku-buku teks, studi ekonomi politik menaruh perhatian pada dua area pokok (Mosco, 1996; Mosco dan Reddick, 1997), yakni, dalam pengertian yang sempit, ekonomi politik adalah studi mengenai hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan-hubungan kekuasaan yang secara bersama-sama mempengaruhi proses produksi, distribusi, dan konsumsi sumber-sumber komunikasi.

Sementara dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi politik merupakan studi mengenai kontrol dan kelangsungan hidup. Menurut Chesney (1998: 3), studi ekonomi politik komunikasi memiliki dua dimensi, yakni melihat hubungan-hubungan media dan sistem komunikasi dalam kerangka struktur masyarakat yang lebih luas. Dimensi ini hendak melihat bagaimana isi media dan sistem komunikasi memperkuat, menantang, dan mempengaruhi hubungan-hubungan sosial dan kelas yang ada. Dimensi kedua melihat bagaimana kepemilikan, mekanisme dukungan (misalnya, iklan) dan kebijakan pemerintah mempengaruhi isi dan perilaku media. Pada dimensi kedua ini, analisis ekonomi politik berusaha mempertajam faktor-faktor struktural dan tenaga kerja yang mempengaruhi proses produksi, distribusi, dan konsumsi komunikasi.

Dengan menggunakan perspektif ekonomi politik, usaha untuk membangun masyarakat informasi harusnya ditempatkan dalam kerangka produksi, distribusi, dan konsumsi pesan komunikasi. Termasuk di dalamnya, bagaimana

pola-pola kepemilikan, dukungan, dan kebijakan pemerintah diberlakukan. Dengan kata lain, membahas masyarakat informasi harus pula melihat sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pesan-pesan komunikasi dan media. Untuk itu, mau tidak mau kita harus membahas tatanan ekonomi politik sekarang ini, yakni neoliberal (*neoliberal order*) dan batas-batas yang ditimbulkannya dalam menciptakan masyarakat informasi yang berkeadilan.

Di Indonesia, usaha mewujudkan masyarakat informasi telah dimulai beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan melihat proses industrialisasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, impian bagi terciptanya masyarakat informasi di Indonesia masih sangat jauh. *Gross National Income* (GNI) kita masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Pada tahun 2008, GNI kita adalah US\$ 1.420 sama dengan Philipina, tetapi kalah jauh dibandingkan dengan Cina (US\$ 2.010), Thailand (US\$ 2.990), Malaysia (US\$ 5.490) dan Singapura (US\$ 29.230) (Siregar, 2008: 41). *Human Development Index* (HDI) yang juga sering dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan juga masih buruk. Pada tahun 2007, HDI Indonesia berada di urutan ke-108 kalah dengan Thailand, Malaysia, Philipina, dan juga Singapura. Tahun 2009, Indonesia berada di urutan ke 111 (0,734) dari 182 negara yang disurvei UNDP. Indeks tersebut menempatkan Indonesia berada dalam garis batas antara Negara Berkembang dan Terbelakang. Tentunya, hal ini akan menyulitkan Indonesia untuk masuk ke dalam masyarakat informasi. Jika HDI-nya buruk, maka banyak prasyarat terciptanya masyarakat informasi tidak akan terpenuhi. Ini karena masyarakat informasi yang ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memerlukan perangkat teknologi, tetapi yang lebih penting adalah



menyentuh kepentingan-kepentingan masyarakat sebagaimana dipersepsikan oleh warga". Kedua, basis kerja pasar adalah kompetisi. Menurut argumentasi neoliberal, kompetisi inilah yang menjadi dasar efisiensi ekonomi. Melalui kompetisi, pasar akan berkerja dalam caranya yang paling efisien, jauh melampaui perencanaan negara yang sentralistik. Kompetisi, dalam banyak kasus, memang menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi ia juga menghasilkan banyak pecundang. Dalam suatu kompetisi model darwinisme sosial semacam itu (Bourdieu, 2003), yang kalah akan semakin termarginalkan, sedangkan yang kuat dan kaya akan semakin berjaya. Akibatnya, kemakmuran hanya mengumpul pada segelintir kelompok masyarakat, yang pada akhirnya menentukan akses mereka terhadap teknologi komunikasi. Padahal, teknologi ini merupakan pedang bermata dua. Bank Dunia telah merangkum dilema revolusi internet ini (Aronson, 2005: 633). Menurut Bank Dunia, pada dasarnya, teknologi internet merupakan peluang dan sekaligus ancaman bagi negara sedang berkembang. Pada satu sisi, teknologi internet menciptakan peluang bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi melalui akses komunikasi yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga berpotensi mengancam negara berkembang karena justru akan mempertajam kesenjangan.

Di luar kesenjangan ekonomi yang berimplikasi pada kesenjangan informasi, Herbert Schiller dengan tajam menganalisis bagaimana pasar menentukan arah perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri. Menurutnya, inovasi informasi dan komunikasi sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan pasar melalui pembelian, penjualan, dan perdagangan dalam rangka mencetak keuntungan (Webster, 1995: 77). Kemudian, menurut Schiller, ketidakseimbangan kelas (*class inequalities*) merupakan faktor utama yang turut menentukan distribusi, akses, dan kapasitas untuk menghasilkan informasi. Kelas menentukan siapa dan jenis informasi apa yang mereka dapat. Pada akhirnya, hal ini akan sangat ditentukan posisinya dalam stratifikasi sosial. Dalam konteks ini, seseorang akan mendapatkan keuntungan dari "revolusi informasi" atau menjadi pencundang tergantung pada posisinya dalam struktur sosial. Berjalan dengan motif mencari keuntungan, kesenjangan ekonomi akibat neoliberalisme, distribusi dan akses informasi hanya akan dikuasai oleh segelintir kelompok masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara maju menjadi pengakses utama

informasi karena mereka mampu membayar atas akses informasi tersebut, sedangkan negara Berkembang atau negara Dunia Ketiga tidak.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2014, diprediksikan 80-85 persen penduduk Amerika akan tersambung ke internet (Aronson, 2005: 634). Jika negara lain gagal mengejar ketertinggalan tersebut, maka akan semakin meneguhkan apa yang diekspresikan oleh Manuel Castells sebagai kesenjangan digital (*digital divide*). Manuel Castells (2001) mengemukakan, "*the social unevenness of the development process is linked to the networking logic and global reach of the new economy... education, information, science, and technology become critical source of value creation in the internet-based economy*" (Aronson, 2005: 634). Sayangnya, neoliberalisme sebagai sebuah tatanan dominan saat ini membuat prasyarat-prasyarat tersebut semakin susah dicapai. Subsidi yang terus-menerus dipangkas (neoliberalisme menganggap subsidi sebagai beban pemerintah) sehingga yang kalah (*the loser*) dalam persaingan global tidak mendapatkan kompensasi yang memadai. Sementara di sisi lain, pasar itu sendiri mempunyai tabiat selalu mencari pembayar tertinggi sehingga ketimpangan pembangunan akan senantiasa berdampak pada ketimpangan informasi. Masyarakat informasi, dengan demikian, akan menjadi mimpi yang semakin jauh bagi sebagian besar masyarakat di Negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

DHARMA - WASPADA



menyentuh kepentingan-kepentingan masyarakat sebagaimana dipersepsikan oleh warganya". Kedua, basis kerja pasar adalah kompetisi. Menurut argumentasi neoliberal, kompetisi inilah yang menjadi dasar efisiensi ekonomi. Melalui kompetisi, pasar akan berkerja dalam caranya yang paling efisien, jauh melampaui perencanaan negara yang sentralistik. Kompetisi, dalam banyak kasus, memang menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi ia juga menghasilkan banyak pecundang. Dalam suatu kompetisi model darwinisme sosial semacam itu (Bourdieu, 2003), yang kalah akan semakin termarginalkan, sedangkan yang kuat dan kaya akan semakin berjaya. Akibatnya, kemakmuran hanya mengumpul pada segelintir kelompok masyarakat, yang pada akhirnya menentukan akses mereka terhadap teknologi komunikasi. Padahal, teknologi ini merupakan pedang bermata dua. Bank Dunia telah merangkum dilema revolusi internet ini (Aronson, 2005: 633). Menurut Bank Dunia, pada dasarnya, teknologi internet merupakan peluang dan sekaligus ancaman bagi negara sedang berkembang. Pada satu sisi, teknologi internet menciptakan peluang bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi melalui akses komunikasi yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga berpotensi mengancam negara berkembang karena justru akan mempertajam kesenjangan.

Di luar kesenjangan ekonomi yang berimplikasi pada kesenjangan informasi, Herbert Schiller dengan tajam menganalisis bagaimana pasar menentukan arah perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri. Menurutnya, inovasi informasi dan komunikasi sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan pasar melalui pembelian, penjualan, dan perdagangan dalam rangka mencetak keuntungan (Webster, 1995: 77). Kemudian, menurut Schiller, ketidakseimbangan kelas (*class inequalities*) merupakan faktor utama yang turut menentukan distribusi, akses, dan kapasitas untuk menghasilkan informasi. Kelas menentukan siapa dan jenis informasi apa yang mereka dapat. Pada akhirnya, hal ini akan sangat ditentukan posisinya dalam stratifikasi sosial. Dalam konteks ini, seseorang akan mendapatkan keuntungan dari "revolusi informasi" atau menjadi pecundang tergantung pada posisinya dalam struktur sosial. Berjalan dengan motif mencari keuntungan, kesenjangan ekonomi akibat neoliberalisme, distribusi dan akses informasi hanya akan dikuasai oleh segelintir kelompok masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara maju menjadi pengakses utama

informasi karena mereka mampu membayar atas akses informasi tersebut, sedangkan negara Berkembang atau negara Dunia Ketiga tidak.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2014, diprediksikan 80-85 persen penduduk Amerika akan tersambung ke internet (Aronson, 2005: 634). Jika negara lain gagal mengejar ketertinggalan tersebut, maka akan semakin meneguhkan apa yang diekspresikan oleh Manuel Castells sebagai kesenjangan digital (*digital divide*). Manuel Castells (2001) mengemukakan, "*the social unevenness of the development process is linked to the networking logic and global reach of the new economy.... education, information, science, and technology become critical source of value creation in the internet-based economy*" (Aronson, 2005: 634). Sayangnya, neoliberalisme sebagai sebuah tatanan dominan saat ini membuat prasyarat-prasyarat tersebut semakin susah dicapai. Subsidi yang terus-menerus dipangkas (neoliberalisme menganggap subsidi sebagai beban pemerintah) sehingga yang kalah (*the loser*) dalam persaingan global tidak mendapatkan kompensasi yang memadai. Sementara di sisi lain, pasar itu sendiri mempunyai tabiat selalu mencari pembayar tertinggi sehingga ketimpangan pembangunan akan senantiasa berdampak pada ketimpangan informasi. Masyarakat informasi, dengan demikian, akan menjadi mimpi yang semakin jauh bagi sebagian besar masyarakat di Negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.



ICT Untuk Membangun Ekonomi Rakyat

Pada awal tulisan ini, saya telah menyinggung bagaimana peranan ICT dalam menopang perkonomian. Globalisasi yang sekarang ini banyak diperdebatkan dan menjadi trend dunia kontemporer (lihat David Held, et. al, 1999; Giddens, 2000; Scholte, 2000) keberlangsungannya sangat dipengaruhi oleh revolusi teknologi komunikasi dan informasi. Melalui teknologi komunikasi dan informasi, ruang dan waktu tidak lagi menjadi persoalan (Harvey, 2000).

Tatanan neoliberal, sebagai suatu perspektif ekonomi politik dominan, memberikan dampak-dampak yang tidak diinginkan dalam usahanya menciptakan masyarakat berkeadilan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, komunikasi maupun politik. Neoliberalisme dalam wajahnya yang sekarang ini telah menciptakan ketimpangan, baik dalam hal pendapatan maupun informasi. Dengan demikian, pasar semata-mata ternyata tidak dapat diandalkan untuk meraih tujuan-tujuan pembangunan. Di bidang komunikasi, sebagaimana telah ditunjukkan pada uraian sebelumnya, neoliberalisme telah menciptakan monopoli, hiperkomersialisasi, dan ketimpangan informasi yang memprihatinkan. Dalam kondisi semacam ini, pertanyaan dasarnya adalah apakah yang harus kita lakukan? Kemudian, dalam konteks pembangunan ICT yang menopang ekonomi kerakyatan, kebijakan apa yang seharusnya diambil sehingga tujuan-tujuan pembangunan dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat dan bukan sebaliknya? Dengan kata lain, pembangunan ICT benar-benar mampu mempersempit informasi asimetris sehingga peluang-peluang usaha dapat dimanfaatkan dengan baik.

Di era globalisasi neoliberal sekarang ini, kita memerlukan peran negara yang tidak hanya menjadi wasit bagi persaingan yang sebenarnya tidak kompetitif. Sebaliknya, kita memerlukan negara yang efektif (Fukuyama, 2005). Hanya negara yang efektiflah yang mampu melakukan intervensi secara efektif pula untuk mengatasi kegagalan pasar. Peranan negara dibutuhkan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia dan juga infrastruktur publik yang sangat penting bagi pembangunan daya saing suatu bangsa. Kesuksesan negara-negara yang kini menjadi Macan Asia seperti Korea Selatan, misalnya, terjadi karena negara mengambil peranan aktif

dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur (Stiglitz, 2002).

Negara memang harus mengambil peran dalam pengembangan infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah miskin. Bagaimanapun pasar akan selalu mencari wilayah-wilayah yang menguntungkan sehingga kecenderungan yang diciptakan oleh mekanisme pasar adalah kesenjangan informasi (*information gap*). Menurut Amir Effendi Siregar (2008: 41), *media development* mempunyai hubungan erat yang bersifat resiprokal terhadap *development of economy*. Untuk itu, pemerintah harus memacu daerah-daerah yang pembangunan ekonominya lemah sehingga dapat memacu perkembangan media. Hanya dengan cara demikian, kesenjangan ICT dapat dikurangi dan masyarakat miskin akan mempunyai peluang lebih besar untuk memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi bagi perbaikan hidup mereka.

Sayangnya, logika yang dibangun dalam pengembangan ICT lebih berat pada usaha bagaimana ICT mampu menopang ekonomi rakyat. Media ditempatkan sebagai variabel yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan bukan sebaliknya. Padahal, dalam konteks ICT dan media berbayar lainnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat akan sangat mempengaruhi akses masyarakat terhadap media dan bukannya sebaliknya. Teknologi informasi memerlukan sumber daya ekonomi untuk mengaksesnya sehingga kemampuan akses akan sangat ditentukan oleh kapasitas atau daya dukung ekonomi masyarakatnya. Jika masyarakatnya miskin, maka rendah pula akses informasinya. Demikian sebaliknya. Untuk itulah, diperlukan sinergi kebijakan antarberbagai sektor agar pembangunan ICT benar-benar memungkinkan ekonomi rakyat.

Pembangunan ICT yang menopang ekonomi rakyat akan berhasil jika setidaknya ditopang oleh dua hal, yakni (1) investasi pemerintah di sektor pendidikan; dan (2) pembangunan ekonomi rakyat kecil yang dilandasi oleh ideologi yang benar-benar berpihak kepada mereka.

Pendidikan merupakan variabel utama dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan ICT bagi ekonomi rakyat kecil. Penguasaan teknologi informasi mensyaratkan pengetahuan dan ketrampilan. Dalam kaitan ini, tugas negara adalah

menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi segenap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Tanpa itu, teknologi hanya akan menjadi sampah bahkan lebih buruk. Ini karena, sebagaimana telah dikemukakan di awal, lemahnya literasi atau pendidikan akan membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh teknologi informasi.

Di sisi lain, ICT tidak akan mampu memberikan kontribusi apapun bagi pengembangan ekonomi kerakyatan di tengah gempuran globalisasi ekonomi yang masif. Tanpa proteksi (dan subsidi), mereka tetap akan menjadi kelompok yang kalah dalam persaingan global. Informasi hanya satu dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi kemampuan ekonomi skala kecil untuk bersaing dan memanfaatkan pasar-pasar yang sedang tumbuh di manca negara. Namun, mereka hanya akan mampu memanfaatkan peluang yang ada jika ada dukungan kredit, ketersediaan bahan baku, sistem transportasi yang murah, birokrasi yang efisien, dan lain sebagainya.

Dalam banyak kasus, pengusaha kecil tidak mempunyai cukup modal sehingga mereka mendapatkan modal dari pengusaha asing. Konsekuensinya, mereka hanya diijinkan menjual produknya ke pengusaha tersebut. Beberapa kasus pengusaha kerajinan di Kuta Bali, misalnya, berada dalam kondisi seperti ini. Jika hal ini tetap berlangsung, maka ICT tidak akan mampu berbuat apapun untuk memajukan ekonomi rakyat. Sebaliknya, "investasi" pemerintah dengan mendorong pembangunan *Community Acces Point* (CAP) di berbagai desa justru hanya akan merugikan masyarakat jika keberadaan teknologi tersebut tidak ditopang oleh kebijakan lain yang mendukung. Tentunya, teknologi yang dipasang di desa-desa yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah tidak didapatkan dengan gratis. Semuanya memerlukan biaya yang tidak kecil. Ini belum termasuk biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mengakses informasi yang disediakan melalui CAP. Jika tidak ditopang oleh pengetahuan dan skill yang cukup, maka yang terjadi justru memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Sumber daya kita mengalir jauh untuk menghidupi perusahaan-perusahaan multinasional penyedia jasa layanan teknologi, tetapi pada waktu bersamaan keuntungan-keuntungan yang didapatkan tidak sepadan.

Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa kebijakan ICT untuk ekonomi rakyat tidak penting. Namun, memberikan teknologi komunikasi kepada kelompok masyarakat ekonomi kecil

tanpa ada jaminan sistem perdagangan yang adil sebagaimana telah dikemukakan Stiglitz di atas adalah sia-sia. Dengan kata lain, membayangkan ICT mampu menolong ekonomi kerakyatan di tengah liberalisasi ugal-ugalan hanyalah mimpi di siang bolong. Terlepas bahwa teknologi itu sendiri memerlukan daya dukung ekonomi, kapasitas intelektual (pendidikan), dan juga kompetensi kebudayaan.

Data mengenai pengguna internet di Indonesia yang disampaikan Ono W. Purbo berikut barangkali bisa menjadi ilustrasi bagaimana penggunaan internet di Indonesia dan pelajaran apa yang bisa kita dapat dari data tersebut. Menurut data Checkfacebook.com, Indonesia menempati peringkat ketujuh pengguna facebook di dunia dengan 17 ribu pengguna. Bahkan, Indonesia merupakan negara paling banyak menambah pengguna facebook di dunia dengan jumlah pengguna 700.000 orang (Ono W. Purbo, Kompas, 8 Februari 2010). Meluasnya penggunaan facebook di Indonesia sebagaimana dikemukakan Ono W. Purbo memang mempunyai dampak positif karena banyak usaha dibangun melalui situs jejaring sosial ini. Namun, trend sesungguhnya masih harus dikaji dengan lebih hati-hati. Selain dampak positifnya dalam mengembangkan usaha, sangat mungkin facebook hanya menjadi aktivitas waktu luang (*leisure*) yang menghabiskan sumber daya.

Dua sisi mata uang yang ditunjukkan oleh semakin luasnya penggunaan situs jejaring sosial di dunia maya ini hanya salah satu contoh kasus dari semakin banyak kasus yang ada. Oleh karena itu, tanpa dukungan kebijakan yang lain, pengembangan CAP di daerah-daerah perdesaan terpencil sangat mungkin hanya akan menambah nafsu konsumtif masyarakat sehingga ICT bukannya memampukan, tetapi justru akan membuat kelompok-kelompok ini semakin termarginalkan. Mereka hanya akan menjadi sumber eksploitasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar (*provider*) melalui teknologi, terlebih jika visi bisnis yang lebih dikedepankan dalam pengembangan ICT sebagaimana dirumuskan oleh aktor-aktor global yang sangat bercorak neoliberal (lihat: Gurumurthy dan Singh, 2005).

Kesimpulan

Ada dua gagasan pokok yang berusaha dikembangkan dalam artikel ini. Pertama, teknologi memang mempunyai peran penting dalam mendukung perekonomian. Ketiadaan akses informasi yang sama membuat keuntungan-keuntungan perdagangan bebas tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil. Oleh karena itu, pengembangan akses informasi bagi masyarakat adalah penting, dan negara harusnya mengambil peran atas hal tersebut. Negara harus mengambil peran dalam pengembangan infrastruktur, termasuk teknologi komunikasi karena pasar neoliberal tidak pernah bisa diandalkan. Pasar hanya akan

menciptakan ketimpangan. Kedua, teknologi seyogianya lebih ditempatkan sebagai katalis bagi perubahan-perubahan yang terjadi dibandingkan sebagai satu-satunya perubahan yang bersifat deterministik. Oleh karena itu, pengembangan ICT yang mampu menopang perekonomian rakyat kecil hanya mungkin terjadi jika kebijakan tersebut ditopang oleh kebijakan lain, misalnya, ketersediaan pendidikan murah, pembangunan sosial ekonomi masyarakatnya, dan proteksi dari akibat merusak perdagangan bebas. Tanpa itu, pembangunan ICT di pedesaan-pedesaan justru hanya menjadi sumber eksploitasi dan semakin mempertajam ketimpangan yang sudah ada.

REFERENSI

- Aronson, Jonathan D (2005). "Causes and Consequences of the Communications and Internet Revolution". Dalam John Baylis & Steve Smith (eds). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Third edition. Oxford University Press
- Bourdieu, Pierre (2003). "Kritik terhadap Neoliberalisme: Utopia Eksploitasi Tanpa Batas menjadi Kenyataan". *Basis*, Nomor 11-12 Tahun ke-52, November-Desember
- Chomsky, Noam (1999). *Profit Over People: Neoliberalism and Global Order*. New York, Seven Stories Press
- Danaher, Kevin. (2006). *10 Alasan Bubarkan IMF dan Bank Dunia*. Yogyakarta: Cindelas
- Fukuyama, Francis (2005). *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Giddens, Anthony (2000). *Runway World*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Green, December dan Laura Luehrmann (2003). *Comparative Politics of the Third World: Lingking Concepts and Cases*. Boulder London: Lynne Rienner Publishers.
- Gurumurthy, Anita dan Parminder Jeet Singh (2005). "Political Economy of the Information Society: A Southern View". Document prepared for Instituto del Tercer Mundo (IteM), Desember 2005. WSIS Papers. Choike.org
- Harvey, David (2000). "Time-Space Compression and the Postmodern Condition", dalam David Held and Anthony Mc Grew (eds.). 2000. *The Global Transformation: A Reader*. Cambridge: Polity Press.
- Harvey, David (2009). *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*. Yogyakarta: Resist Book
- Held, David et.al. (1999). *Global Transformations: Politics, Economic, and Culture*. Stanford, California: Stanford University Press
- Hudson, Heather E (2006). "Universal Acces to the New Information Infrastructure". Dalam Leah A. Lievrouw dan Soni Livingstone (eds.) *Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs*. updated student edition. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications
- McChesney, Robert W (1997). "The Communication Revolution: The Market and the Prospect for Democracy". Dalam Mashoed Bailie dan Dwayne Winseck (eds.). *Democratizing Communication? Comparative Perspectives on Information and Power*. Cresskill, New Jersey: Hampton Press Inc.
- McChesney, Robert M (1998). "The Political Economy of Global Communication". Dalam Robert McChesney, Ellen Meiksins Wood, dan John Bellamy Foster (eds.). *Capitalism and the Information Age: The Political Economy of the Global Communication Revolution*. New York: Monthly Review Press.
- Mosco, Vincent (1996). *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications
- Mosco, Vincent dan Andrew Reddick (1997). "Political Economy, Communication and Policy". Dalam Mashoed Bailie dan Dwayne Winseck (eds.). *Democratizing Communication? Comparative Perspectives on Information and Power*. Cresskill, New Jersey: Hampton Press Inc.
- Priyono, Hery B (2004). "Marginalisasi Ala Neoliberal". *Basis* Nomor 05-06, Tahun ke-53, Mei-Juni
- Purbo, Ono W (2010). "Dunia Internet Kita". *Kompas*, 8 Februari 2010
- Rantanen, Terhi (2006). *The Media and Globalization*. London, Thousand Oaks, and New Delhi. Sage Publications.

- Scholte, Jan Art (2000). *Globalization: A Critical Introduction*. New York: St. Martin Press
- Siregar, Amir Effendi (2008). "Regulasi, Peta dan Perkembangan Media: Meiwan dan Mencegah Monopoli". *Jurnal Sosial Demokrasi*, vol. 3, No. 1, Juli-September 2008.
- Soros, George (2007). *Open Society: Reforming Global Capitalism*. Jakarta: Yayasan Obor
- Stiglitz, Joseph (2002). *Globalization and Its Discontents*. Allen Lane: Penguin Books
- Stiglitz, Joseph (2007). *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi, Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Jakarta: Mizan
- Straubhaar, Joseph and Robert LaRose (2006). *Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology*. Fifth Edition. Thompson Wadworth.
- Sugiono, Muhadi (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Webster, Frank (1995). *Theories of The Information Society*. London: Routledge
- Witte, James C dan Susan E. Mannon (2010). *The Internet and Social Inequalities*. New York and London: Routledge

Website

<http://www.gatra.com/artikel.php?id=131473>

